

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKEP

MITAMI DIAN M



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKEP

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MITAMI DIAN M

A31108264



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PANGKEP

Disusun dan diajukan oleh

MITAMI DIAN M
A311 08 264

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin SE, M.Soc, Sc, Ak
NIP 196312101990021001

Nadhirah Nagu SE, M.Si, Ak
NIP 19740206200812201

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, M.Si, Ak
NIP 196305151992031003

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PANGKEP

Disusun dan diajukan oleh

MITAMI DIAN M
A311 08 264

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 2 Mei 2013 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarifuddin, SE, M.Soc, Sc, Ak	Ketua	1.....
2.	Nadhirah Nagu, SE, M.Si, Ak	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Grace T. Pontoh, M.Si, Ak	Anggota	3.....
4.	Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak	Anggota	4.....
5.	Drs. Muh. Nur Azis, MM	Anggota	5.....

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, M.Si, Ak
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mitami Dian M
NIM : A311 08 264
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 mei 2013

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

Mitami Dian

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh makhluk dan alam semesta serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang mendalam dan tulus kepada orang tuaku, ibunda Hj. Sri Dinastiawati, SE, ayahanda Hidayat Jonas Manggis, S.Sos, M.Ap, serta kanda dan adik-adikku tersayang, yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang untuk kelancaran studi penulis.

Terima kasih yang istimewa kepada teman hidup penulis, Muhammad Dirgantara Madjid, SE untuk segala cinta dan kesabaran dalam menghadapi penulis selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini. Terimakasih pula kepada,

1. Bapak Rektor, Dekan beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dalam segala proses pengurusan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, serta Bapak/Ibu dosen atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.

2. Bapak Dr. Syarifuddin, SE, M.Sos, Sc, Ak dan Ibu Nadhirah Nagu, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang tulus dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Kahar Mustakim, S.Kom selaku Kasubag Keuangan pada DPKAD Pangkep atas segala bantuan, waktu dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian ini.
4. Ketiga sahabatku tersayang AZIZAH SYARIF, SE, NUR AVIA ASTRINI, SE, dan YOFIKA YUSRAN, A.Md atas segala doa, perhatian, waktu, tenaga, dan segala bantuan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terima kasih untuk persahabatan yang terjalin ini, semoga kita tetap akur dalam ikatan persahabatan.
5. Seluruh teman-teman 08stackle serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat rahmat dari Allah SWT. Tidak lupa pula penulis memohon maaf untuk segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Amin Ya Rahman

Wassalam

Makassar, 1 Mei 2013

Penulis

ABSTRAKSI

(Dian Mitami, 2013). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada Pemkab Pangkep. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pembimbing (1) Dr. Syarifuddin SE, M.Soc, Sc, Ak (2) Nadhirah Nagu SE, M.si, Ak.*

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten Pangkep, serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep sehingga mampu menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Responden dalam penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari pegawai DPKAD Pangkep yaitu pegawai bagian penatausahaan, pegawai bagian penganggaran, pegawai bagian akuntansi dan pelaporan serta kepala DPKAD pangkep.

Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai DPKAD pangkep serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai DPKAD Pangkep sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan *input* dan *output* datanya. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang penerapan SIMDA keuangan yaitu integritas, profesionalisme, komitmen, sinergi serta kesempurnaan

Kata Kunci : akuntansi, SIMDA Keuangan, faktor-faktor, penerapan, nilai-nilai, kualitas informasi

ABSTRACT

(Dian Mitami, 2013). Finance SIMDA Implementation in the DPKAD Pangkep. Thesis Department of Accounting Faculty of Economics and Bussines, University of Hasanuddin. Supervisor : (1) Dr. Syarifuddin SE, M.Soc,Sc, Ak (2) Nadhirah Nagu SE, M.Si, Ak

This study aiming to obtain an overview of the implementation of financial SIMDA on Departement of finance and assets management area (DPKAD) Pangkep and to know the factors and values held by supports of DPKAD finance SIMDA so as to apply early and the information generated from the implementation of SIMDA Keuangan. Responden in the study as much as 4 (four) people consisting of DPKAD Pangkep is officer in the administration, officer in the budgeting, officer in the accounting and reporting, and head of DPKAD Pangkep.

Data were collated through direct interviews with the responden using an interview guide, direct observation of the activities of employees DPKPD Pangkep and documentation study of related documents. The interviews and data collected were analyzed by using descriptive method of phenomenological approach.

Results from the study showed that in general employees DPKAD pangkep already understand the meaning of finance SIMDA, overview of the implementation of the related with data output and input, the factors that have to support the implementation of finance SIMDA, namely : communication, human resources, the attitude/disposition and bureaucratic structure. While the values held to support the implementation of finance SIMDA, namely : integrity, professionalism, commitment, synergy, and perfection.

Key words : finance SIMDA, the factors, implementation, and values

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB IPENDAHULUAN	
1.1 Konteks Penelitian atau Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Sistem Informasi Manajeme	7
2.2 Manfaat dan Kualitas Informasi	8
2.2.1 Manfaat Informasi	8
2.2.2 Kualitas Informasi	9
2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah	9
2.3.1 Tujuan dan Manfaat SIMDA	10
2.3.2 Klasifikasi SIMDA.....	11
2.3.3 Unsur SIMDA	11
2.4 Aplikasi SIMDA Keuangan	12
2.4.1 Perkembangan SIMDA Keuangan	12
2.4.2 Output yang Dihasilkan.....	13
2.4.3 Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan	14
2.4.4 Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan.....	15
2.4.5 Pembiayaan dan Penerapan SIMDA Keuangan	16
2.4.6 Sumber Daya Manusia	16
2.5 Teori Implementasi Kebijakan.....	18
2.6 Nilai-Nilai pendukung implementasi kebijakan	21
2.7 Penelitian terdahulu	22
2.8 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.2 Kehadiran Penelitian	26

3.3	Lokasi Penelitian	27
3.4	Sumber Data	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data	27
3.6	Analisis Data	29
3.7	Pengecekan Validitas Temuan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN		
4.1	Profil DPKAD Pangkep	31
4.1.1	Visi	31
4.1.2	Misi	31
4.1.3	Nilai	32
4.1.4	Tujuan	32
4.1.5	Sasaran	33
4.1.6	Strategi	33
4.1.7	Kebijakan Organisasi	34
4.1.8	Struktur Organisasi	36
4.1.9	Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja DPKAD Pangkep	39
4.1.10	Sumber Daya Manusia	40
4.1.11	Gambaran Implementasi SIMDA Keuangan pada DPKAD Pangkep	41
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
4.2.1	Pemahaman Makna SIMDA	47
4.2.2	Faktor-faktor Pendukung yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep dalam menerapkan SIMDA Keuangan	56
4.2.2.1	Komunikasi	57
4.2.2.2	Sumber Daya Manusia	57
4.2.2.3	Disposisi/Sikap	59
4.2.2.4	Struktur birokrasi	61
4.2.3	Kualitas Informasi yang dihasilkan dari Penerapan SIMDA Keuangan	66
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	27
4.1 Tahapan Kebijakan DPKAD Pangkep.....	37
4.2 Struktur Organisasi DPKAD Pangkep.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Demografi Pegawai Berdasarkan tingkat Pendidikan.....	44
4.2	Analisis Data Pertanyaan Penelitian Pertama.....	46
4.3	Analisis Data Pertanyaan Penelitian Kedua.....	48
4.4	Analisis Data Pertanyaan Penelitian Ketiga.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan....”

Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume anggaran dan belanja daerah (APBD) dari

tahun ke tahun. Menurut data ringkasan APBD tahun 2008-2009 Provinsi Sulawesi Selatan, total volume pendapatan daerah mencapai 2.026.082.000.000 pada tahun 2008 dan meningkat sebesar 9,1% pada tahun 2009 sebesar 2.209.465.000.000. Demikian halnya dengan total volume anggaran belanja daerah meningkat sebesar 8,6% dari 1.979.220.000.000 pada tahun 2008 dan sebesar 2.288.469.000.000 pada tahun 2009. Menurut sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan volume transaksi keuangan pemerintah. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerahnya.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut.

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan

proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

P.Siagian (dalam Ridwan, 2009) menyatakan bahwa.

“Pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.”

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. SIMDA Keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja

Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 56 tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, sebanyak sebelas pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan SIMDA Keuangan, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Pangkep yang telah berhasil menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya

&penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan SIMDA Keuangan khususnya tentang pemahaman pegawai, faktor-faktor pendukung penerapan SIMDA Keuangan serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut. **"Analisis Penerapan Sistem informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pangkep"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan dan gambaran pelaksanaan SIMDA Keuangan pada Pemkab Pangkep ?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki Pemkab Pangkep sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan ?
- c. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada Pemkab Pangkep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai.

- a. Sejauh mana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan dan gambaran tentang pelaksanaan SIMDA Keuangan pada Pemkab Pangkep.

- b. Apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemkab Pangkep sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan.
- c. Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini digunakan untuk.

- a. Peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang SIMDA Keuangan, faktor-faktor pendukung serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.
- b. Pemerintah Daerah :
 - Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan SIMDA Keuangan tentang faktor-faktor pendukung dalam penerapannya di lapangan dan langkah-langkah untuk mewujudkan/mencapai faktor-faktor tersebut serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya.
 - Sebagai referensi mengenai penerapan SIMDA Keuangan.
- c. Akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian yaitu pengertian sistem informasi manajemen (SIM), manfaat penggunaan komputer di dalam SIM, konsep sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan, teori implementasi kebijakan publik dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, mencakup pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang profil Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dan gambaran pelaksanaan SIMDA Keuangan dan pembahasan tentang penerapannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian, saran yang melibatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri baik secara praktis, teoritis dan metodologis serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut Sutanta (2003:3) sistem adalah “sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”. Sutanto (2007:46) mendefinisikan informasi sebagai “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2007:58) sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut Mcleod (2010:11) “sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Menurut Kumorotomo (2004:7) “sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi”. Lebih lanjut Kumorotomo (2004: 9) menjelaskan bahwa “unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*)”.

2.2 Manfaat dan Kualitas Informasi

2.2.1 Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta (2003:11) adalah :

1. Menambah pengetahuan

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi

Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.

3. Mengurangi risiko kegagalan

Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan

Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.

5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

2.2.2 Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Ahituv dalam Jogiyanto (2007:16) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam karakteristik, yaitu :

1. Akurasi (*accuracy*)
2. Ketepatan waktu (*timelines*)
3. Relevan (*relevance*)
4. Agregasi (*agregacy*)
5. Pemformatan (*formatting*)

Swanson dalam Jogiyanto (2007:16) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (*uniqueness*), ketepatan (*conciseness*), kejelasan (*clarity*) dan keterbacaan (*read ability*).

2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga *outputnya* dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi

pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-governemen*; dan
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 1. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 2. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2.3.2 Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

2.3.3 Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu.

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b. Portal, pelayanan publik, situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

2.4.1 Perkembangan SIMDA Keuangan

SIMDA Keuangan mengalami tiga tahapan perubahan, yaitu.

1. SIMDA Ver. 1.0

Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil diaplikasikan pada sembilan pemerintahan daerah.

2. SIMDA Ver. 2.0

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan PP No. 58

Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai aplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem ini berhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah.

3. SIMDA Ver. 2.1

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling *update* yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2.4.2 Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Surat Tanda Setoran (STS);
 - e. Register; dan
 - f. Surat pengendalian lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Jurnal;
 - b. Buku besar;
 - c. Buku pembantu;
 - d. Laporan realisasi anggaran;
 - e. Laporan arus kas; dan
 - f. Neraca.

Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan :

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran;
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan;
- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan
- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan.

2.4.3 Fungsi Program Aplikasi Simda Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing (EDP)* audit.

2.4.4 Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. *Output*/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Kesenambungan *Maintenance*

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

3. *Transfer of Knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan "satu kali untuk selamanya."

4. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

2.4.5 Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasilainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasangprogram tersebut. Hal inilah yang membuat

SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

2.4.6 Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai *counterpart*. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satker. Khusus untuk administrator database SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan komputer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi.

Proses *transfer knowledge* dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe *counterpart*. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari *business process* program aplikasi SIMDA Keuangan bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya *troubleshooting*. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.5 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah “suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor”(Grizzle dan Pettijohn: 2002). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C.Edward III. Menurut Edward dalam Subarsono (2005:90) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*resource*), Sikap (*diposition*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*)”. Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

1) **Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah sebuah implementasi dapat terlaksana.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya *implementor* tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan bingung dengan apa yang akan dilakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

2). **Sumberdaya**

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang

diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (Jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk melakukan penerapan kebijakan. Untuk itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Informasi merupakan sumber daya lainnya yang penting bagi pelaksana kebijakan. Terdapat dua bentuk informasi, yaitu :

- a. Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan
- b. Informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Selain SDM dan informasi, sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan seperti kantor, dan peralatan

3) Disposisi atau sikap

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh *implemeentor*, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka sebuah kebijakan akan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.6 Nilai-Nilai Pendukung Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan harus didukung oleh nilai-nilai dari aparatur pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan dapat berjalan efektif. Nilai-nilai pendukung yang hendaknya dimiliki oleh aparatur Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Pangkep sebagai aparatur pelaksana kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas dalam hal ini adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme

Profesionalisme berarti bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang

tinggi. Tanggung jawab dalam hal ini berkaitan erat dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Melalui penerapan nilai akuntabilitas, maka suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.

3. Sinergi

Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Adapun indikatornya, antara lain :

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

5. Kesempurnaan

Kesempurnaan dalam hal berkaitan dengan senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Niftahusaadah (2010), dalam penelitiannya berjudul persepsi satuan kerja perangkat daerah terhadap pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah

(SIMDA) keuangan pada pemerintah Kota Bandung menggunakan metode *deskriptif komparatif* untuk membandingkan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan. Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan 63 Responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: (1) persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum pemanfaatan SIMDA Keuangan adalah “cukup baik”, sedangkan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan adalah “sangat baik”, maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persepsi SKPD, (2) dari pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD di Pemerintah Kota Bandung sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan, hal ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan SIMDA Keuangan dalam mendukung penyusunan LKPD, dan (3) adanya perbedaan persepsi antara BPK dan SKPD terhadap hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan.

2.8 Kerangka Pikir

Sesuai dengan amanat PP Nomor 56 tahun 2005 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Maka BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai auditor internal dan pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merancang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah.

Meskipun telah diamanatkan dalam PP Nomor 56 tahun 2005, namun pelaksanaan akuntansi oleh pemerintah daerah tidak sedikit yang masih menggunakan sistem manual. Salah satu pemerintah daerah yang telah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan adalah Pemerintah Kabupaten Pangkep dan 10 kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Pangkep dengan model kualitatif pendekatan fenomenologi. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah di lapangan (*natural setting*). Data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian dilakukan analisis dan validasi. Analisis terdiri dari organisasi data, pemahaman untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkan pada teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

